



DAMPAK TATA KELOLA PENGEMBANGAN PARIWISATA BAGI PEROLEHAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KLATEN

IMPACT OF TOURISM DEVELOPMENT GOVERNANCE FOR REGIONAL REVENUE EARNING IN KLATEN REGENCY

Elva Windhi Astuti^{*1}, Hardian Wahyu Widiyanto¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 05-07-23

Diperbaiki 11-07-23

Disetujui 19-07-23

Kata Kunci:

Tata Kelola, Pengembangan Pariwisata, Retribusi Pariwisata

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kepariwisataan yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata Klaten sekaligus mengetahui dampak tata kelola bagi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari retribusi pariwisata Klaten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah pemangku kepentingan kepariwisataan di lingkup pemda, Kelompok Sadar Wisata, Pegawai Objek Wisata. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan proses tata kelola dalam pengembangan pariwisata sudah dijalankan oleh aktor kepentingan kepariwisataan Klaten. Proses tata kelola yang dijalankan melalui indikator partisipasi akuntabilitas, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, supremasi hukum, dan transparansi. Dampak dari tata kelola yang dijalankan yaitu terjalannya hubungan antar aktor dalam melakukan pengembangan wisata, terbentuknya laporan pertanggungjawaban, adanya proses pelayanan, komitmen pemerintah yang kuat, penegakkan aturan untuk memperhatikan kondisi lingkungan objek wisata, dan keterbukaan terhadap publik. Namun, dalam tata kelola yang dijalankan masih ditemui hambatan yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh belum optimal yaitu dari aspek kemampuan SDM yang kurang mempunyai kompetensi di bidang pariwisata, belum kuatnya isi aturan, belum terintegrasinya hubungan antar objek wisata, penegakkan hukum yang belum menyeluruh terkait dengan pelayanan kepada publik, dan promosi yang kurang intens. Hal ini mengakibatkan pendapatan retribusi kurang optimal dan belum sesuai target yang dilihat dari jumlah objek wisata dan kunjungan wisata yang minim berasal dari wilayah lokal saja

ABSTRACT

Keywords:

Governance, Tourism Development, Tourism Levies

This research aims to analyze tourism governance carried out in the development of Klaten tourism as well as determine the impact of governance on the acquisition of Regional Original Income (PAD), especially from Klaten tourism levies. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The research subjects were tourism stakeholders within the regional government, Tourism Awareness Groups, Tourism Object Employees. Data analysis techniques are carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the governance process in tourism development has been carried out by Klaten tourism interest actors. The governance process is carried out through indicators of accountability participation, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and transparency. The impact of the governance implemented is the establishment of relationships between actors in carrying out tourism development, the formation of accountability reports, the existence of service processes, strong government commitment, enforcement of rules to pay attention to the environmental conditions of tourist attractions, and openness to the public. However, in the governance that is implemented, there are still obstacles that cause the income obtained to be not optimal, namely from the aspect of human resource capacity which lacks competence in the tourism

DOI: <https://doi.org/zxxx/i.vxxx.xxx>

Email: elvawindhi.2019@student.uny.ac.id

*Penulis korespondensi: hardianwahyuwidiyanto@uny.ac.id

sector, the content of regulations is not yet strong, relations between tourist attractions are not yet integrated, law enforcement is not yet comprehensive regarding services. to the public, and less intense promotion. This results in levy income being less than optimal and not meeting targets as seen from the minimal number of tourist attractions and tourist visits coming from local areas only.

1. Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya memiliki hakikat untuk mewujudkan tujuan nasional suatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Maksud dari kebijakan tersebut adalah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mampu mengelola dan memberdayakan daerahnya terutama terkait dengan sumber daya yang tersedia pada masing – masing daerah. Qomariyah (2017) menjelaskan bahwa terdapat ciri utama daerah otonom yang mampu berotonomi yaitu dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri. Dapat diartikan bahwa, daerah yang sudah diberi kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, juga diberikan kewenangan untuk menggali sumber – sumber keuangan secara mandiri.

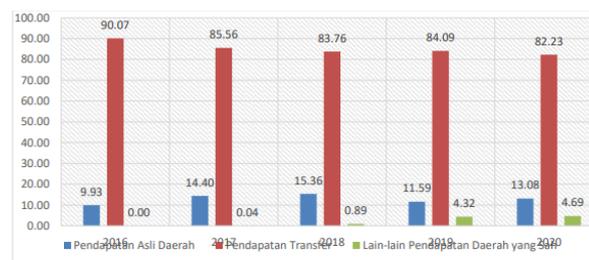
Kinerja ekonomi dapat tumbuh karena terdapat berbagai potensi yang bisa digali dan dikembangkan di daerah. Sektor- sektor yang dapat membawa perubahan perekonomian contohnya seperti sektor jasa, perdagangan, pertambangan, industri pengolahan, pertanian, pariwisata, dan lain-lain. Salah satu sektor yang mampu berkembang dan tumbuh dengan cepat yaitu sektor pariwisata. Menurut Wahab dalam (Windhyastiti, 2016:40) pariwisata merupakan industri yang berkembang dengan gaya baru, karena dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam hal pendapatan, kesempatan kerja, taraf hidup, dan memunculkan produksi baru.

Pengembangan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan perencanaan karena terdapat tata kelola yang digunakan sebagai acuan oleh pemangku kepentingan. Tata kelola bidang pariwisata berarti segala aktivitas yang dilakukan oleh pengelola atau pelaku wisata dalam mengatur seluruh proses pengembangan pariwisata agar tercipta pembangunan pariwisata berkelanjutan (Wardana, 2020:14). Dengan adanya tata kelola yang baik yang dijalankan oleh pemangku kepentingan pariwisata, mampu memberikan dampak bagi keberlangsungan pariwisata terutama terhadap pendapatan daerah melalui hasil tata kelola berupa banyaknya jumlah objek wisata dan banyaknya jumlah pengunjung yang berwisata. Faktor-faktor perolehan pendapatan daerah dari sektor pariwisata berupa banyaknya objek wisata dan banyaknya kunjungan wisata (Rai Utama, 2017:5-6).

Seperti yang ada di Kabupaten Klaten, Pariwisata di Kabupaten Klaten telah ramai dilakukan berbagai pengembangan. Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebanyak 137 yang terdiri dari wisata alam 47 objek, wisata sejarah 8 objek, wisata buatan 32 objek, dan jenis wisata religi sebanyak 50 objek (Diskominfo Klaten, 2021). Namun, untuk objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata Klaten jumlahnya kurang lebih hanya 10 objek. Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT), pemerintah pusat mengarahkan kebijakan pada Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur – Yogyakarta – Prambanan (KSPN-BYP) (P3tb.pu.go.id). Dengan adanya arah kebijakan tersebut, wilayah Klaten masuk

didalamnya dan pemerintah merespon dengan mengembangkan pariwisata ke arah single destination tourism (Diskominfo Klaten, 2022). Menurut Sri Nugroho, Kepala Disbudporapar Klaten, pengembangan single destination tourism bertujuan agar wisata Klaten menjadi tujuan utama wisatawan dengan mengunggulkan potensi lokal dan berbasis kemitraan (Diskominfo Klaten, 2022). Bentuk pengembangan lainnya yaitu adanya pelatihan dari Pemerintah Klaten terhadap pemandu wisata yang berada di objek wisata subsektor budaya. Tujuannya untuk menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama para pemandu wisata budaya agar memiliki kompetensi yang cukup (Disbudporapar.klaten, 2022b).

Dengan adanya berbagai pengembangan dan prestasi di sektor pariwisata Klaten, terdapat kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata Klaten. Kebijakan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Perda Kabupaten Klaten No.3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab.Klaten Tahun 2014-2029. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan tujuan utama dari pengembangan pariwisata di Klaten yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata. Walaupun memiliki berbagai prestasi yang dicapai dalam pengembangan pariwisata di Klaten, masih ada sisi lain yang belum maksimal dalam target yang sudah ditetapkan. Permasalahan yang terjadi yaitu kemandirian fiskal dalam membiayai urusan pemerintahan masih rendah (Agung, 2019). Berikut dipaparkan tingkat pendapatan Kabupaten Klaten tahun 2021.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 1. Grafik Perbandingan Pendapatan di Kabupaten Klaten tahun 2021
Sumber: BPKAD Kab. Klaten, 2021

Berdasarkan grafik tingkat pendapatan Kabupaten Klaten diatas, dapat dimaknai bahwa PAD Kabupaten Klaten masih dikatakan rendah. Hal ini karena pendapatan Klaten masih didominasi dari transfer pemerintah pusat. Besarnya transfer dari pemerintah pusat mencapai 70%, sedangkan PAD yang diperoleh hanya berkisar pada angka 9,93% - 15,36% (RPJMD, 2021). Selanjutnya, berdasarkan Laporan Dinas Pariwisata Klaten terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi objek wisata Kabupaten Klaten, pendapatan retribusi objek wisata Klaten belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan dari pendapatan retribusi objek wisata yang dikelola oleh pemda sebesar Rp 2.450.225.000,00. Namun dalam realisasi pendapatan retribusi objek wisata tahun 2021 jumlahnya sebesar Rp 871.832.301,00. Pada tahun 2022, pendapatan retribusi dari objek wisata Klaten yang dikelola oleh pemda juga tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Target yang ditetapkan untuk perolehan

retribusi objek wisata di Klaten tahun 2022 sebanyak Rp 3.135.247.500. Namun, realisasi pendapatan yang diperoleh hanya sebesar Rp 2.349.878.950,00. Pendapatan dari sektor pariwisata tahun 2021 dan 2022 apabila dibandingkan dengan belanja daerah sektor pariwisata, mengalami defisit anggaran.

Dalam sektor pariwisata, dana dari pemerintah pusat dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan sektor pariwisata. Transfer dana dari pemerintahan pusat untuk perkembangan pariwisata di Kabupaten Klaten angkanya termasuk tinggi, yaitu dengan pagu mencapai Rp 5.563.732.000 (OM SPAN KPPN Klaten). Salah satu penyebab rendahnya pendapatan retribusi pariwisata di Klaten karena jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata Klaten masih minim. Banyak masyarakat yang kurang tertarik untuk menghabiskan waktu libur di kawasan Klaten. Pengunjung yang datang hanya terbatas pada masyarakat di sekitar Klaten dan belum menyeluruh. Berikut data pengunjung wisata di Kabupaten Klaten dari tahun 2021-2022.

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Wisata Kab. Klaten

2021			2022		
Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
463	1.632.085	1.632.548	60.461	4.777.338	4.837.799

Sumber: Disbudporapar Klaten

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wisatawan Klaten pada tahun 2021 sebanyak 1.632.548 orang dan pada tahun 2022 meningkat jumlahnya menjadi 4.837.799 orang. Dengan jumlah pengunjung tersebut, masih terbilang rendah dan tidak sesuai target. Minimnya tingkat PAD di Kabupaten Klaten, berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat Klaten. Hal ini dapat diketahui dari angka kemiskinan di Kabupaten Klaten yang cukup tinggi (Agung, 2019). angka kemiskinan di Klaten tahun 2018 sejumlah 151.730.00 atau 12.86%, kemudian di tahun 2019 jumlah penduduk miskin mengalami sedikit penurunan yaitu sejumlah 144.140.00 atau 12.28%. Namun, pada tahun 2020 jumlah kemiskinan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 151.830.00 atau 12.89%.

Permasalahan yang masih terjadi dalam proses pembangunan daerah khususnya sektor pariwisata tersebut, disebabkan karena tata kelola pemerintahan yang kurang optimal. Dilihat dari aspek akuntabilitas, pemerintah daerah dalam kepariwisataan menetapkan sasaran berupa peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata dengan indikator sasaran persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata. Untuk target kinerja yang akan dicapai sebesar 25%. Dalam pelaksanaannya, menetapkan kebijakan terciptanya peningkatan potensi wisata dengan daya saing tinggi. Namun, akibat pandemi covid-19 capaian kinerja pemerintah daerah belum sesuai target dan hanya terealisasi sebesar 12,87%. Hal ini berdampak pada penurunan PAD sektor pariwisata (LKjIP, 2021).

Selanjutnya, dilihat dari aspek kualitas peraturan, aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola pariwisata Klaten belum menjalankan perannya dengan baik, seperti pelaksanaan pemerintah daerah belum optimal. Hal ini terlihat dari kurang terintegrasinya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Klaten dan terdapat objek

wisata yang kurang diperhatikan oleh pemerintah (Agung, 2019). Menurut (Nurhadi, 2004:326) pembangunan pariwisata merupakan upaya melakukan perubahan secara terstruktur dan memiliki perencanaan yang matang serta dilakukan secara berkelanjutan di bidang kepariwisataan. Perencanaan dalam pembangunan pariwisata didalamnya termasuk kegiatan merencanakan pengelolaan pariwisata. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan (Widiati, 2016:12) bahwa pembangunan pariwisata dapat terlaksana karena terdapat sumber daya managerial yang bisa melakukan pengelolaan potensi pariwisata. Dalam proses pengelolaan pariwisata, peran pemerintah menjadi penentu dari keberhasilan pengembangan pariwisata (Windhyastiti, 2016:39).

Untuk mencapai keberhasilan sektor pariwisata, perlu tata kelola yang baik dan dibutuhkan berbagai unsur aktor yang terlibat agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan efektif. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Dredge & Jenkins, 2003:421) bahwa dalam mencapai tujuan yang menyangkut kepentingan bersama, perlu adanya kerjasama dan hubungan timbal balik antar pemangku aktor yang terlibat dalam kepentingan yang terkait. Dalam (Bovaird & Löffler, 2003:316), menjelaskan bahwa konsep tata kelola sendiri merupakan suatu proses interaksi antar pemangku kepentingan dalam sebuah persoalan dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan yang akan disepakati bersama, selanjutnya diterapkan dan dilakukan evaluasi secara berkala. Dalam hal ini, tata kelola pariwisata tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi aktor dari non- pemerintah juga terlibat. Pencapaian keputusan nantinya akan menjadi tanggung jawab bersama juga.

Pentingnya penyusunan penelitian ini dengan topik analisis pengembangan pariwisata yang ditinjau dari tata kelola yang dilakukan yaitu tata kelola pariwisata sangat berpengaruh pada keberlangsungan peningkatan sektor pariwisata. Dengan adanya pariwisata yang berkembang baik akan memberikan manfaat lebih bagi daerah terutama pada peningkatan pendapatan daerah. Penerimaan daerah menjadikan kegiatan pemerintahan menjadi lebih mandiri dan mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Daerah mampu meningkatkan perekonomian dan mengangkat potensi yang ada di daerah. Hal ini dapat tercipta apabila tata kelola berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan tersendiri untuk melakukan penelitian terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah beserta permasalahan yang dialami dalam proses mengetahui dampak terhadap pendapatan retribusi dari sektor pariwisata di Kabupaten Klaten. Oleh sebab itu penulisan skripsi ini mengangkat judul “Dampak tata kelola pengembangan pariwisata bagi perolehan pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten”.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang disusun oleh penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data- data yang didapatkan dan disajikan faktual, sistematis, dan bentuk kongkrit dengan apa yang ada di lapangan. Bogdan dan Taylor dalam (Abdussamad, 2021:30), mengemukakan bahwa pendekatan

kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan langsung dari manusia atau kata – kata tertulis dan berupa tingkah laku yang dapat diamati. Dibutuhkan data dan fakta secara mendalam dalam mengetahui tata kelola dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten. Hal ini agar dapat menelaah lebih jauh proses yang berjalan dalam pengembangan pariwisata dan sekaligus memahami dampak yang terjadi terutama terkait dengan penerimaan pendapatan.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi yang akan menjadi penelitian ini berada di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Klaten. Peneliti tertarik untuk menjadikan organisasi perangkat daerah Kabupaten Klaten tersebut menjadi tempat penelitian karena OPD yang terlibat memiliki andil besar dalam memberikan informasi terkait topik penelitian dan terlibat dalam pengembangan pariwisata secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai data pendukung penelitian, peneliti juga melakukan penelitian di salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Klaten, yaitu pada Desa Wisata Bugisan. Desa wisata bugisan merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Klaten dengan mengunggulkan atraksi wisata berupa Candi Plaosan. Selanjutnya penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret – April 2023.

2.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dijadikan narasumber untuk diwawancarai dilakukan dengan teknik purposive. Dalam hal ini peneliti berfokus pada pihak yang posisinya memiliki pengalaman, pengetahuan, dan bersedia membagikan informasi terkait proses kepariwisataan dan terkait pengelola keuangan daerah terutama dari PAD sektor pariwisata di Kabupaten Klaten. Subjek dalam penelitian ini antara lain: Kepala bidang kepariwisataan di Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Klaten, analis pariwisata di Disbudporapar Klaten, pengelola pendapatan daerah dari retribusi pariwisata Klaten, Kepala bidang perekonomian, SDA infrastruktur dan kewilayahan Bappedalitbang Klaten, kelompok sadar wisata Desa Bugisan, pegawai pada objek wisata.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk menghimpun data ialah sebagai berikut.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan terjun langsung ke lokasi untuk melakukan pengamatan yang berkaitan dengan penelitian. Pengamatan dilakukan di lokasi yang berkaitan dengan fasilitas yang ada di lokasi penelitian yang mendukung dalam pengembangan pariwisata di Klaten, selanjutnya mengamati actor-aktor yang terlibat dalam kegiatan sosial tentang tata kelola pariwisata sampai terkait dampak yang dihasilkan dari pariwisata Kabupaten Klaten.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara lisan yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan pariwisata dan pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Klaten.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi diartikan sebagai pengambilan data yang dihimpun dari sumber-sumber dokumen. Dokumen yang diperoleh berupa Peraturan Daerah tentang Kepariwisata, Pengelolaan Pariwisata di Klaten, data Laporan Keuangan terutama PAD sektor pariwisata..

2.5 Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan agar data-data yang didapatkan dapat tervalidasi. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi. Dalam (Sugiyono, 2017:273) memaknai teknik triangulasi sebagai teknik pengecekan data dari seluruh data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Pengecekan data melalui teknik triangulasi, berarti peneliti sudah melakukan pengujian kredibilitas data. Dalam penelitian ini, pengecekan data yang dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, dimana data akan dicek dari sumber-sumber yang berbeda. Sumber yang berbeda berasal dari lingkup pemerintah daerah Kabupaten Klaten yang terdiri dari OPD Klaten yang terlibat dalam tata kelola pengembangan pariwisata Klaten.

2.6 Teknik Analisis Data

Miles & Huberman dalam (Salim, 2012:147) mengemukakan bahwa analisis data yaitu serangkaian susunan atau kegiatan mengolah data agar mudah ditafsirkan lebih lanjut. Teknik analisis data menurut Miles & Huberman dalam (Salim, 2012:147) yaitu menganalisis data kualitatif dengan model interaktif. Model tersebut terdiri dari reduksi data penyajian data, dan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

a. Reduksi data

Teknik pada tahap ini yaitu yaitu proses analisis yang berupa pemilihan dan menyederhanakan data yang didapatkan di lapangan.

b. Penyajian data

Dalam penyajian data memuat informasi data-data yang tersusun secara terstruktur dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mampu memberikan tindakan lebih lanjut.

c. Kesimpulan

Kesimpulan data merupakan proses terakhir dalam melakukan analisis data. Kesimpulan dilakukan sebagai upaya mencari tema, pola dan hubungan dari data yang telah direduksi dan disajikan setelah itu diprediksi hasil yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

Tata kelola merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan oleh aktor kepentingan yang saling berinteraksi dan mencapai tujuan bersama. Tata kelola menurut (Bovaird & Löffler, 2003:316), merupakan suatu proses interaksi antar pemangku kepentingan dalam sebuah persoalan dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan yang akan disepakati bersama. Tata kelola bidang pariwisata berarti segala aktivitas yang dilakukan oleh pengelola atau pelaku wisata dalam mengatur seluruh proses pengembangan pariwisata agar tercipta pembangunan pariwisata berkelanjutan (Wardana, 2020:14). Dengan adanya persoalan terkait dengan rendahnya kemandirian fiskal, rendahnya pendapatan dari sektor pariwisata, dan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata masih belum optimal. Hal ini terutama dilihat dari aspek akuntabilitas dan kualitas peraturan yang kurang berhasil.

Dalam (Kaufmann, 2011:222), menjelaskan bahwa tata kelola atau manajemen merupakan proses pemangku kepentingan dan institusi dalam menjalankan otoritasnya sesuai dengan tradisi yang ada. Dalam hal ini, institusi pemerintah memiliki peran utama dalam dimulainya pelaksanaan tata kelola. Indikator tata kelola yang dirumuskan oleh (Kaufmann, 2011:223) antara lain partisipasi dan akuntabilitas, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, supremasi hukum, dan transparansi. Indikator-indikator tersebut sebagai acuan dalam membatasi penelitian yang dilakukan dengan menjabarkan proses tata kelola dan menjawab permasalahan terkait tata kelola pariwisata di Kabupaten Klaten. Tata kelola yang terjadi dapat memberikan dampak bagi perolehan hasil wisata. Bidang pariwisata memungut retribusi sebagai penerimaan pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Klaten, yang menjelaskan retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pungutan daerah yang dibayarkan oleh seorang atas pelayanan dan penyediaan tempat rekreasi atau pariwisata yang ada serta dikelola oleh Pemerintah Daerah Klaten. Pendapatan dari sektor pariwisata terutama dari retribusi pariwisata dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi banyaknya jumlah pendapatan yang diperoleh. Faktor-faktor perolehan pendapatan daerah dari sektor pariwisata menurut (Rai Utama, 2017:5-6) yaitu jumlah objek wisata yang beroperasi dan jumlah kunjungan wisata. Berikut penjelasan tata kelola dan dampaknya yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di Klaten.

3.1 Partisipasi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pariwisata Klaten

Proses tata kelola terdapat indikator partisipasi dan akuntabilitas, dimana adanya keterlibatan berbagai pihak untuk dapat berpartisipasi dalam mencapai tujuan dan menyatukan berbagai gagasan sesuai dengan potensi yang dimiliki serta mengetahui sejauh mana perwujudan tanggung jawab dari aktor yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata yang ada di Kabupaten Klaten menerapkan partisipasi terhadap antar aktor yang terlibat. Pihak-pihak yang berkaitan dilibatkan dalam tata kelola pariwisata Klaten mulai dari perencanaan, proses pembangunan pariwisata, sekaligus evaluasinya. Bentuk partisipasi yang terjadi yaitu dari pihak Bappedalitbang Klaten melakukan koordinasi terhadap

perencanaan pariwisata Klaten. Pihak utama yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Klaten adalah masyarakat. Dengan adanya pelibatan masyarakat, dapat memberikan dampak terhadap pendapatan daerah dan akan membangkitkan perekonomian Klaten sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Pemerintah daerah Klaten mendorong keterlibatan masyarakat dengan menyelenggarakan suatu pelatihan- pelatihan yang dapat menarik pengunjung. Contohnya yaitu pelatihan tourguide, pelatihan outbond, pelatihan digital marketing, dan pelatihan homestay. Dengan adanya pelatihan-pelatihan dari pemerintah Klaten tersebut, dapat memperkuat Sumber Daya Manusia agar mampu berkembang dan bersaing dalam mengelola destinasi wisata yang ada.

Pertanggungjawaban yang jelas juga dibutuhkan dalam tata kelola pariwisata. Hal ini dilakukan sebagai kelanjutan dari rencana yang ditetapkan dan mengetahui kualitas kinerja dari aktor yang terlibat utamanya instansi pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja juga dibuat oleh OPD teknis yaitu Disbudporapar Klaten, yang mana didalamnya termasuk mengelola bidang pariwisata di Klaten. Selain itu, Disbudporapar Klaten juga membuat laporan hasil Pendapatan Asli Daerah dari hasil retribusi objek wisata yang dikelola oleh Disbudporapar Klaten.

Target terhadap sasaran kinerja yang ditetapkan sebesar 25%, namun pada kenyataannya yang menjadi realisasi hanya sebesar 12,87%. Hal ini membuktikan bahwa pengembangan pariwisata di Klaten terhambat dan pendapatan dari sektor pariwisata menjadi menurun terutama dari pendapatan retribusi objek wisata. Hal ini sesuai dengan laporan yang ada pada RPJMD Klaten 2021-2026 yang menjelaskan bahwa belum optimalnya pengembangan pemasaran, pengembangan destinasi, serta penataan kawasan pariwisata dibuktikan dengan jumlah objek wisata yang cenderung stagnan yaitu sebanyak 7 objek wisata naungan pemerintah dan kunjungan masih didominasi wisatawan lokal (Klaten, Solo Raya, DIY), penyebabnya yaitu belum adanya pola atau paket perjalanan wisata yang terstruktur (travel pattern).

3.2 Efektivitas Pemerintah dalam Tata Kelola Pariwisata Klaten

Efektivitas pemerintah berarti menangkap persepsi tentang kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan yang ditentukan dalam pengelolaan suatu bidang. Tata kelola pariwisata dalam pelaksanaannya menyangkut peran utama dari pemerintah setempat, dalam hal ini instansi pemerintah di Kabupaten Klaten. Dalam konteks efektivitas pemerintah, berdasarkan penggalian informasi dapat diketahui bahwa pemerintah Klaten sudah cukup baik dalam menjalankan prosedur dengan baik. Bentuk pelayanan Bappedalitbang Klaten terkait pariwisata yaitu melakukan perencanaan dan selanjutnya tahap pelaksanaan serta evaluasi di lakukan oleh OPD teknis yaitu Disbudporapar Klaten. Disbudporapar Klaten, tepatnya bidang pariwisata dalam pelaksanaannya menyediakan pelayanan berupa pembinaan dan pelatihan untuk pengelola destinasi wisata, pemeliharaan destinasi wisata, dan pemenuhan infrastruktur pendukung pariwisata. sesuai dengan peraturan pariwisata di Kabupaten Klaten, yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Klaten pada Bab 15 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasal 48.

Disamping itu, pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola pariwisata memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaannya. Hal ini karena dengan adanya komitmen yang tinggi akan menguatkan pariwisata Klaten dan mampu berkembang baik dan berdaya saing. Pihak pemerintah Klaten memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan pariwisata, karena secara umum yang menjadi tumpuan di Kabupaten Klaten ada beberapa sektor, diantaranya ada pertanian, industri dan pariwisata yang banyak dikembangkan. Dari aspek pariwisata, aktor pemerintah memiliki komitmen dalam membranding destinasi wisata yang diunggulkan di Klaten yaitu umbul destinasi alam. Walaupun dalam branding masih kurang apabila dibandingkan dengan destinasi wisata lain yang mempunyai branding tinggi seperti Candi Prambanan.

Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam merumuskan sebuah kebijakan, terutama terkait dengan pengembangan pariwisata di Klaten. Menurut data dan sumber yang didapatkan dari aktor pemerintah, kontribusi dan peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan pelaksanaannya cukup efektif. Mulai dari perencanaan pariwisata yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD), dan Jangka Pendek. Dalam perencanaan tertuang visi misi pembangunan aspek pariwisata di Klaten. Selanjutnya, hal ini juga berkaitan dengan regulasi pemanfaatan ruang yang dikembangkan untuk daerah wisata (Perda RTRW 2021-2041). Dalam perumusan kebijakan, pemerintah juga selalu menyingkronkan dengan perencanaan-perencanaan yang dibuat oleh pemerintah di level atasnya. Dalam hal ini pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat sedang proses membuat program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang meliputi kawasan Borobudur, Jogjakarta, dan Prambanan. Dengan adanya program tersebut, daerah Klaten masuk didalamnya dan pemerintah Klaten merespon dan menangkap peluang dengan membuat program yang memiliki kebermanfaatan lebih bagi pariwisata yang ada di Klaten. Bentuk respon yang dilakukan yaitu mulai mengembangkan paket wisata dan jalur- jalur wisata yang ada di Klaten. Harapannya agar Klaten menjadi tujuan wisata utama bukan hanya ampiran saja.

3.3 Kualitas Peraturan yang Diterapkan dalam Tata Kelola Pariwisata Klaten

Adanya peraturan pariwisata menjadi langkah awal dalam menjalankan dan arah dari pengembangan pariwisata. Berdasarkan hasil dari penggalian informasi, dapat diketahui bahwa kualitas peraturan terkait dengan pariwisata yang ada di Klaten belum maksimal. Hal ini diketahui dari pelaksanaannya yang masih mengalami kendala. Pariwisata di Kabupaten Klaten dalam implementasinya belum saling terintegrasi dan masih berdiri sendiri-sendiri. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan belum bisa optimal dalam memberikan pemahaman masyarakat terutama kepada pelaku wisata. Kondisi yang terjadi saat ini di Kabupaten Klaten yaitu belum adanya kolaborasi secara utuh tiap daerah. Pada setiap daerah memiliki keunggulan dan potensi masing-masing. Apabila dalam pelaksanaannya saling terintegrasi dapat mewujudkan pariwisata yang lebih maju.

Hal ini karena dari pihak masyarakat pun cenderung memiliki kemampuan yang minim sehingga kurang siap dalam menghadapi industri pariwisata. Kemampuan yang kurang disebabkan karena masyarakat Klaten tidak memiliki basic dalam menjalankan pelayanan kepada pengunjung terkait dengan kepariwisataan. Sehingga masyarakat belum memahami apabila melakukan kerjasama atau kolaborasi antar objek wisata akan lebih menguntungkan. Peraturan yang ada belum dijalankan dengan baik karena masyarakat belum memahami isi dari peraturan yang menyangkut aturan untuk saling terintegrasi, yaitu yang tertuang pada BAB IV pasal 6 ayat 6 tentang prinsip penyelenggaraan kepariwistaan.

Kualitas peraturan yang masih dilakukan revisi terkait dengan acuan peraturan yang diubah dan secara implementasi juga masih ditemui permasalahan, akan berdampak pada pendapatan yang diperoleh. Pengembangan pariwisata yang belum berjalan sesuai dengan isi peraturan mempengaruhi pendapatan karena tujuan utama dari pengembangan pariwisata yang dijelaskan dalam aturan yaitu untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hubungan antar objek wisata yang kurang terintegrasi akan mempengaruhi wisatawan yang berkunjung tidak terlayani dengan penuh dan akan membuat pengunjung tidak tertarik lagi untuk mengulang datang ke objek wisata. Sehingga, pendapatan yang diperoleh juga cenderung fluktuatif dan minim. Solusi yang sudah dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman bagi masyarakat atau pelaku wisata oleh pemangku kepentingan pemerintah yaitu terus memberikan sosialisasi secara intens dan menjalin hubungan yang erat antara OPD teknis terkait. Hal ini dilakukan agar pelaku wisata memiliki kesadaran dan dapat mengelola objek wisata yang ada dengan terarah.

3.4 Supremasi Hukum yang Dilakukan dalam Tata Kelola Pariwisata Klaten

Supremasi hukum merupakan aktivitas patuh dan percaya terhadap peraturan serta menangkap kualitas penegakkan aturan yang dilaksanakan. sumpremasi hukum ini menunjukkan bahwa sudah ada dasar atau aturan yang mengatur penyelenggaraan pariwisata. Dalam aturan yang tersedia juga sudah membahas mengenai larangan maupun hukuman apabila adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan pariwisata di Klaten. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Klaten harus berdasarkan aturan yang ada dan memiliki komitmen yang tinggi agar pengembangan pariwisata di Klaten lebih maju dan menyejahterkan masyarakat. Peraturan yang menjadi dasar terselenggaranya pengembangan pariwisata di Klaten yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2014-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Klaten.

Untuk penegakkan pelaksanaan belum terlalu intens. Penegakkan lebih diutamakan pada perhatian terhadap lingkungan. Sehingga, belum intens menjelaskan larangan bagi pelaku wisata terkait dengan pengelolaan terhadap pelayanan maupun prosedur dalam mengelola hasil pendapatan yang diperoleh. Jadi untuk penegakkan yang dilakukan lebih mengarahkan pada ketertiban, keamanan umum, dan bagaimana dalam objek wisata dilengkapi dengan pendukungnya atau infrastruktur yang lengkap. Hal ini berhubungan dengan

pendapatan yang diperoleh, karena banyaknya jumlah pengunjung dipengaruhi oleh pelaku wisata yang menjalankan proses wisata di tempat wisata secara langsung.

3.5 Transparansi dalam Tata Kelola Pariwisata Klaten

Transparansi merupakan proses keterbukaan setiap apa yang dilakukan maupun yang dicapai dalam pengembangan pariwisata yang secara nyata diperuntukan kepada publik. Indikator yang akan dibahas pada bagian ini yaitu terkait dengan transparansi pelaksanaan sekaligus hasil dari tata kelola pariwisata di Kabupaten Klaten. Tata kelola pariwisata di Kabupaten Klaten saat ini mulai menunjukkan keterbukaannya kepada publik. Dapat diketahui mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, pemangku kepentingan selalu melibatkan dan memberikan informasi kepada publik. Proses perencanaan sendiri dilakukan dari instansi Bappedalitbang, dimana dalam pelaksanaannya sudah terbuka. Pengadaan musrembang mulai dari musrembang kecamatan maupun musrembang kabupaten. Pelaksanaan musrembang sendiri selalu melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki kemampuan di bidang pariwisata.

Disbudporapar Klaten sebagai organisasi sektor publik sekaligus pelaksana pengembangan pariwisata Klaten, secara keseluruhan menekankan adanya transparansi. Segala aktivitas tata kelola pemerintahan diusahakan selalu transparan agar terciptanya partisipasi dan kepercayaan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu membuat sistem yang jelas dan terbuka agar mudah tersampaikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial dan website, melalui media cetak, melalui tatap muka langsung dengan publik.

3.6 Dampak Tata Kelola Pengembangan Pariwisata

Pendapatan retribusi yang diperoleh dipengaruhi oleh hasil banyaknya objek wisata yang dimunculkan dan banyaknya pengunjung yang datang ke objek wisata

3.6.1 Objek Wisata

Objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi pariwisata Klaten jumlahnya masih minim. Jumlah objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dibawah naungan Disbudporapar Klaten yang beroperasi aktif dan menghasilkan pendapatan retribusi hanya ada 7 objek wisata. Tata kelola yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi yang ada masih kurang. Dalam penciptaan dan pengembangan objek wisata, kinerja pemerintah daerah Klaten masih kurang optimal karena dalam perencanaan pariwisata kurang kompeten.

Seperti yang ada pada penciptaan objek wisata Gondang Winangoen, dimana pengembangan yang dilakukan tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki pada objek tersebut karena analisis perencanaan yang kurang matang dan penegakkan aturan yang cenderung diabaikan. Objek wisata tersebut, berusaha mengembangkan wisata air dimana tidak sesuai dengan kondisi wilayah yang bukan daerah yang memiliki potensi sumber air melimpah. Sementara diwilayah lain sudah ada pengembangan wisata air yang memang memiliki sumber air melimpah. Sehingga objek wisata tersebut tidak dapat beroperasi lama dan tidak berkelanjutan. Seperti penelitian dari Hasthoro & Sunardi (2016), yang menyatakan

bahwa tata kelola akan memberikan dampak pada hasil yang akan dicapai. Dalam hal ini, pencapaian berupa pendapatan pemerintah daerah.

3.6.2 Jumlah Kunjungan Wisata

Bertambahnya jumlah kedatangan wisatawan ke objek wisata akan menentukan keberhasilan pariwisata suatu daerah yang dilihat dari penerimaan daerah (Rai Utama, 2017). Data rangkuman penelitian menunjukkan bahwa kunjungan wisata ke objek wisata di Klaten mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena tata kelola yang dijalankan juga belum maksimal. Berdasarkan analisis dari tata kelola yang dijalankan, aspek kualitas peraturan, supremasi hukum, dan transparansi masih kurang mengakibatkan kunjungan wisata juga tidak meningkat. Kunjungan wisata masih terbatas pada masyarakat yang ada disekitaran daerah Klaten dan belum terbranding sampai ke lingkup luas.

4. Kesimpulan

Simpulan

Dampak tata kelola pariwisata bagi perolehan pendapatan PAD dari retribusi pariwisata dapat diketahui melalui hasil dari jumlah objek wisata yang berkembang dan jumlah wisatawan yang berkunjung. Dampak yang dihasilkan menunjukkan belum tercapainya target perolehan pendapatan. Pengembangan pariwisata di Klaten memang mulai digencarkan oleh pemerintah dengan menggugulkan potensi yang ada. Namun, data dalam tata Kelola yang dijalankan oleh pemangku kepentingan pariwisata di Klaten memang kinerja belum maksimal karena dilihat dari hasilnya yang belum memberi dampak bagi Pembangunan daerah Klaten. Partisipasi yang terjadi dalam tata kelola pariwisata di Klaten sudah dilaksanakan oleh aktor-aktor kepariwisataan. Selanjutnya yaitu proses akuntabilitas yang terjadi dalam penelitian yaitu melakukan pemantauan kinerja dan evaluasi serta membuat laporan pertanggungjawaban dari hasil yang telah dicapai dalam bentuk LKjIP. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program hanya tercapai 12,8% dari targetnya 25% karena terkendala oleh pandemi, kemampuan SDM yang kurang, dan pendanaan yang lambat. Dari aspek efektivitas pemerintah, tata kelola pariwisata sudah menunjukkan adanya ketepatan dalam menjalankan prosedur yang direncanakan dan mampu merespon kondisi yang tidak menentu. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan sudah sesuai, komitmen pemerintah, dan kontribusi dalam perumusan kebijakan cukup baik. Kualitas peraturan yang digunakan dalam aspek pengembangan pariwisata Klaten perlu diperhatikan. Peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan pariwisata belum maksimal hasilnya karena saat penelitian dijelaskan bahwa peraturan terkait pariwisata masih dalam tahap revisi dan dalam implementasinya masih kurang terintegrasi.

Dalam implementasinya tata kelola pariwisata di Klaten menunjukkan bahwa penegakkan aturan sudah ada dilihat dari larangan dan sanksi yang didalam aturan dan sudah diterapkan. Ttransparansi sudah mulai dilakukan baik secara langsung melalui forum atau secara digitalisasi. Informasi yang diberikan berupa program-program yang dijalankan, promosi, laporan Hasil pelaksanaan pariwisata berupa laporan pertanggungjawaban dan laporan pendapatan. Namun, keterbukaan informasi yang diberikan kepada publik belum intens. Dapat diketahui bahwa tata

kelola pariwisata Klaten sudah dilakukan, namun belum seluruh aspek dapat berjalan dengan maksimal. Pembuktian selanjutnya dalam penelitian yaitu pendapatan hasil dari pariwisata belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tata kelola pariwisata memberikan hasil terhadap jumlah objek wisata yang dikembangkan dan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini menjadi faktor untuk mengetahui keberhasilan pendapatan yang diperoleh. Jumlah objek wisata yang dikelola pemerintah masih minim dan jumlah kunjungan menunjukkan angka yang fluktuatif sehingga perolehan pendapatan retribusi pariwisata di Klaten belum mencapai target.

Saran

Perlu adanya perhatian lagi bagi seluruh aktor kepentingan pariwisata dan adanya beberapa saran dari peneliti yaitu: Pemerintah daerah terutama Disbudporapar Klaten sebagai penggerak utama penyelenggaraan pariwisata di Klaten perlu mendorong para pelaku wisata untuk lebih sadar pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam meningkatkan kemajuan pariwisata di Klaten. Dibentuknya forum bagi seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pariwisata untuk diskusi terkait dengan peluang dan tantangan pelaksanaan pariwisata di masa sekarang dan yang akan datang. Perlu penguatan kemampuan SDM di bidang digitalisasi agar pelaksanaan promosi objek wisata di Klaten menjadi lebih intens dan menarik. Pelaksanaan transparansi terkait dengan laporan kinerja dan laporan hasil pendapatan sebaiknya dipublikasikan secara berkala dalam jangka waktu yang tidak lama. perlu adanya sistem yang lebih efisien untuk pencairan dana. Dalam pemunculan objek wisata Klaten harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing tanpa memaksakan memunculkan objek wisata yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Referensi

- [1] Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In CV syakir Media Press (Vol. 4, Issue 1).
- [2] Agung. (2019). Potensi Pariwisata dan Upaya Peningkatan PAD Klaten. Krjogja.Com. <https://www.krjogja.com/angkringang/re-ad/415875/potensi-pariwisata-dan-upaya-peningkatan-pad-klaten>
- [3] Bovaird, T., & Löffler, E. (2003). Evaluating the quality of public governance: Indicators, models and methodologies. *International Review of Administrative Sciences*, 69(3), 313–328. <https://doi.org/10.1177/0020852303693002>
- [4] Disbudporapar.klaten. (2022b). Pelatihan Pemandu Wisata Budaya di Kabupaten Klaten. Disbudporapar.Klaten.Go.Id. <https://disbudporapar.klaten.go.id/pelatihan-pemandu-wisata-budaya-di-kabupaten-klaten>
- [5] Diskominfo Klaten. (2021). Akibat Pandemi, Kunjungan Wisata di Klaten Terpaksa Turun. Klaten.Go.Id. <https://klatenkab.go.id/akibat-pandemi-kunjungan-wisata-di-klaten-terpaksa-turun/>
- [6] Diskominfo Klaten. (2022). Disbudporapar Klaten Matangkan Single Destination Tourism. Klatenkab.Go.Id. <https://klatenkab.go.id/disbudporapar-klaten-matangkan-single-destination-tourism/>
- [7] Dredge, D., & Jenkins, J. (2003). Federal-State relations and tourism public policy, *New South Wales, Australia. Current Issues in Tourism*, 6(5), 415–443. <https://doi.org/10.1080/13683500308667963>

- [8] Hasthoro, H. A., & Sunardi, S. (2016). Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 53. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>
- [9] Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- [10] Nurhadi, F. D. et al. (2004). Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2(2), 325–331.
- [11] P3tb.pu.go.id. (n.d.). RIPT (Rencana Induk Pariwisata Terpadu). P3tb.Pu.Go.Id. Retrieved January 18, 2023, from https://p3tb.pu.go.id/in/main/project_location/borobudur/121/172/237
- [12] Rai Utama, B. (2017). Pemasaran Pariwisata. Jakarta: CV Andi Offset.
- [13] Salim, S. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Ciptapustaka Media.
- [14] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [15] Wardana, A. (2020). Good Tourism Governance dalam Pengelolaan Beautiful Malino di Kabupaten Gowa. In *Kaos GL Dergisi* (Vol. 8, Issue 75).
- [16] Widiati, T. (2016). Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan. Disertasi: Universitas Terbuka
- [17] Windhyastiti, I. & W. (2016). Pentingnya Aspek Government Power dalam Pengembangan Industri Pariwisata Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1).